



Research Article

Konseptualisasi Asas dan Nilai Dasar dalam Kebijakan Pendidikan Islam: Prinsip dan Etika dalam Perspektif Islam

Fenny Erdiyani

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia; fennyerdiyani@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Responsive: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 14, 2025
Accepted : December 17, 2025

Revised : November 19, 2025
Available online : January 27, 2026

How to Cite: Fenny Erdiyani. (2026). Conceptualization of Basic Principles and Values in Islamic Education Policy: Principles and Ethics from an Islamic Perspective. *Responsive: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.61166/responsive.v2i1.61>

Conceptualization of Basic Principles and Values in Islamic Education Policy: Principles and Ethics from an Islamic Perspective

Abstract. Islamic education plays a strategic role in shaping a generation of faithful, noble characters, and contributing to national development. However, Islamic education policy in Indonesia often faces problems, such as biases from pragmatic, political, and technocratic interests that cause the normative principles and basic values of Islamic teachings to be neglected. This study aims to formulate a conceptual framework regarding the principles, basic values, principles, and ethics in Islamic education policy. The method used is library research by analyzing primary sources (the Qur'an, hadith, Law No. 20 of 2003) as well as secondary literature in the form of books and scientific articles. The results show that the principles of Islamic education include monotheism, justice, freedom, equality, and deliberation, while its basic values include divine, human, moral, social, and scientific. The principles of Islamic education policy are based on justice, benefit, accountability, and trustworthiness, while its ethics emphasize monotheism, social justice, honesty, and responsibility. This finding emphasizes the importance of making Islamic principles and basic values not merely

normative guidelines, but also a practical basis for developing educational policies that are fair, sustainable, and in line with the main goal of Islamic education, namely to form perfect human beings.

Keywords: Islamic Education, Principles, Basic Values, Principles, Ethics, Policy

Abstrak. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Namun, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia kerap menghadapi problematika, seperti bias kepentingan pragmatis, politis, dan teknokratis yang menyebabkan asas normatif serta nilai dasar ajaran Islam terabaikan. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka konseptual mengenai asas, nilai dasar, prinsip, dan etika dalam kebijakan pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menganalisis sumber primer (Al-Qur'an, hadis, UU No. 20 Tahun 2003) serta literatur sekunder berupa buku dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pendidikan Islam mencakup tauhid, keadilan, kebebasan, persamaan, dan musyawarah, sementara nilai dasarnya meliputi ilahiah, insaniyah, akhlak, sosial, dan keilmuan. Prinsip kebijakan pendidikan Islam bertumpu pada keadilan, maslahat, akuntabilitas, dan amanah, sedangkan etikanya menekankan tauhid, keadilan sosial, kejujuran, dan tanggung jawab. Temuan ini menegaskan pentingnya menjadikan asas dan nilai dasar Islam bukan sekadar pedoman normatif, tetapi juga pijakan praktis dalam membangun kebijakan pendidikan yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan tujuan utama pendidikan Islam yaitu membentuk insan kamil.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Asas, Nilai Dasar, Prinsip, Etika, Kebijakan

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki posisi strategis sebagai instrumen pembentukan generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pendidikan Islam seringkali menghadapi problematika serius.¹ Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak jarang terjebak pada kepentingan pragmatis, politis, dan teknokratis, sehingga asas normatif dan nilai dasar ajaran Islam kurang mendapat perhatian. Akibatnya, tujuan utama pendidikan Islam untuk membentuk insan kamil sebagaimana visi luhur Al-Qur'an menjadi tersingkirkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas ajaran Islam dan implementasi kebijakan yang berlangsung.

Secara ideal, kebijakan pendidikan Islam harus berpijak pada asas normatif seperti tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan musyawarah, serta dilandasi nilai-nilai dasar seperti ilahiah, insaniyah, akhlak, sosial, dan keilmuan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-'Alaq ayat 1-5 yang menegaskan pentingnya pengetahuan yang berbasis pada nilai ketuhanan, serta QS. An-Nahl ayat 90 yang menekankan prinsip keadilan, kebajikan, dan persaudaraan. Rasulullah SAW juga bersabda: *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"* (HR. Ahmad), menegaskan bahwa pendidikan dan kebijakannya harus membawa kemaslahatan. Dari perspektif regulasi, Undang-

¹ Rifatus Sholehah, dkk, "Peran Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Yang Religius, Toleran, Dan Berakhlak Mulia Di Era Globalisasi," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 8 (2025): 110-117. <https://doi.org/10.59435/menulis.vii8.564>.

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional harus berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman.

Beberapa kajian terdahulu menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap asas dan nilai dalam pendidikan Islam, meskipun fokus dan sudut pandangnya berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Syafira dkk. (2022) menegaskan bahwa asas pendidikan Islam harus berlandaskan wahyu, khususnya prinsip tauhid, meski kajiannya masih terbatas pada aspek normatif tekstual.² Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra dkk. (2024) membahas dasar pendidikan Islam dari perspektif multidimensi, tetapi belum menghubungkannya dengan kebijakan pendidikan.³ Penelitian yang dilakukan oleh Atina dkk. (2025) membahas pentingnya nilai-nilai etis, moral, dan estetika sebagai landasan pendidikan Islam, namun lebih menekankan pada aspek filsafat daripada kebijakan praktis.⁴

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini menawarkan kerangka konseptual komprehensif tentang asas dan nilai dasar kebijakan pendidikan Islam dengan menekankan prinsip dan etika Islam sebagai fondasi normatif sekaligus praktis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian konseptual dengan pendekatan library research yang bertujuan membangun kerangka konseptual mengenai asas, nilai dasar, prinsip, dan etika dalam kebijakan pendidikan Islam. Data penelitian bersumber dari literatur primer, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan regulasi pendidikan seperti UU No. 20 Tahun 2003, serta literatur sekunder berupa buku dan artikel jurnal nasional maupun internasional yang relevan, termasuk kajian terdahulu dari Syafira dkk. (2022), Azzahra dkk. (2024), Atina dkk. (2025). Data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dengan menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi penting sesuai fokus penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Asas Kebijakan Pendidikan Islam

Secara etimologis, "asas" diartikan sebagai dasar atau pijakan.⁵ Dalam konteks pendidikan Islam, merujuk pada prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan filosofis dan teologis. Prinsip-prinsip ini menjadi kebenaran fundamental yang digunakan sebagai titik tolak dalam merumuskan dan melaksanakan seluruh proses

² Ade Chia Syafira, dkk, "Dasar dan Asas Pendidikan dalam Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 7405–7410. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9512>.

³ Radita Azzahra, dkk, "Analisis Dasar-Dasar Pendidikan Islam Berdasarkan Perspektif Filosofis, Akademis, Sosiologi, Politik, Dan Ekonomi," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2024): 134–149. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v10i2.512>.

⁴ Atina, dkk, "NILAI-NILAI AKSIOLOGIS DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025): 223–234. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.26239>.

⁵ Nurhalimatus Sirait dan Suriana, "Macam-Macam Asas Pendidikan Islam," *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 528–534. <https://doi.org/10.3059/insis.v0i1.18344>

pendidikan. Nilai-nilai ini memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial, yang secara inheren terintegrasi dalam setiap aktivitas pembelajaran.

Kebijakan pendidikan Islam dibangun di atas asas-asas fundamental yang berfungsi sebagai landasan konseptual. Asas yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

a) Tauhid

Asas tauhid tidak hanya menegaskan keesaan Allah, tetapi juga berfungsi sebagai landasan integratif yang menyatukan seluruh aspek kehidupan, ilmu, dan tujuan pendidikan. Semua ilmu, amal, dan tujuan hidup dikembalikan kepada Allah SWT.⁶ Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-'Alaq ayat 1 yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan"

Salah satu contoh implementasi kebijakan dari asas ini yaitu penyusunan kurikulum PAI yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai tauhid, seperti pelajaran sains yang dikaitkan dengan ayat-ayat kauniyah.

b) Keadilan

Asas ini memastikan pemerataan akses pendidikan tanpa diskriminasi (tanpa memandang status sosial, latar belakang, atau perbedaan lainnya) sehingga dapat menciptakan lingkungan yang setara.⁷ Sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Contoh dari penerapan asas ini yaitu adanya program beasiswa Bidikmisi atau sering dikenal KIP yang dapat memberikan akses pendidikan tinggi bagi siswa yang kurang mampu.

c) Kebebasan

Asas ini memberi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dengan tetap menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap suatu pilihan ataupun tindakan. Sejalan dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang

⁶ Hairus Saleh, "Landasan Filosofis Pendidikan Islam (Peran Tauhid dalam Konsep Pendidikan Islam Ismail Raji al-Faruqi)," *FAKTA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, No. 1 (2023): 29-42. <http://ejournal.idia.ac.id/index.php/fakta>.

⁷ Siti Aminah Saing, dkk, "Eksplorasi Peran Keadilan Sosial dan Budaya Dalam Menciptakan Lingkungan Pendidikan Yang Inklusif," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 3 (2023): 407-418. <https://doi.org/10.9000/jpt.v2i3.1382>.

(teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

Contoh kebijakan pada asas kebebasan adalah penerapan *project-based learning* dalam kurikulum merdeka, tetapi tetap diarahkan pada nilai moral islami.

d) Persamaan

Asas ini menegaskan kesetaraan hak dan martabat manusia dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam ajaran Islam, baik dalam hal gender maupun sosial. Sejalan dalam QS. Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti".

Salah satu implementasi kebijakan dari asas ini adalah madrasah memberi kesempatan yang sama bagi siswa laki-laki dan perempuan dalam OSIS maupun ekstrakurikuler.

e) Musyawarah

Asas ini mengutamakan pentingnya proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan pendidikan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan diterima secara luas.⁸ Sebagaimana dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".

Contoh kebijakan dengan asas ini adalah penyusunan kurikulum madrasah aliyah yang melibatkan guru, orang tua, tokoh agama, dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, asas-asas fundamental dalam kebijakan pendidikan Islam bukan hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan insan kamil sesuai dengan nilai-nilai ilahiah dan kemanusiaan.

Nilai Dasar Kebijakan Pendidikan Islam

Selain asas kebijakan pendidikan Islam, juga terdapat nilai-nilai dasar yang melandasi kebijakan pendidikan Islam adapun diantaranya:

a) Ilahiah

Berisi pengakuan bahwa segala bentuk pengetahuan berasal dari Allah sehingga dapat membentuk kesadaran bahwa pendidikan adalah ibadah. Pada nilai dasar ini,

⁸ Usri, "Pendidikan Islam dan Demokrasi," *AL-Mutsila: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2019): 82-104. <https://doi.org/10.46870/jstain.vii2.10>.

pendidikan diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sejalan dengan QS. Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku".

Implementasi dari nilai dasar ini berupa Program tahfizul Qur'an di sekolah berbasis Islam yang masuk kurikulum resmi.⁹

b) Insaniyah

Menekankan martabat dan kemanusiaan melalui penghormatan pada hak dan kedudukan yang setara, serta wujud dari pengembangan sifat rendah hati, dermawan dan pemaaf.¹⁰ Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".

Salah satu contoh penerapannya adalah diadakannya pendidikan inklusi di madrasah bagi siswa berkebutuhan khusus.

c) Akhlak

Memfokuskan pada pembentukan moral dan etika yang luhur agar dapat melahirkan individu yang memiliki akhlak mulia. Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia" (HR. Ahmad).¹¹

Contoh penerapannya berupa Program *character building* berbasis nilai Islam seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.¹²

d) Sosial

Lebih menekankan pada keadilan, solidaritas, dan persaudaraan serta pentingnya menepati janji untuk membentuk hubungan sosial yang harmonis. Pendidikan memberi manfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

⁹ Najiburrahman, dkk, "Implementation of the Tahfidz Quran Program in Developing Islamic Character," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022): 3546-3599. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i4.2077>.

¹⁰ Andi Sarima, "PENDIDIKAN INKLUSI (ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS) PERSPEKTIF ILMU PENDIDIKAN ISLAM," *Jurnal Al-Qayyimah* 6, no. 1 (2023): 68-79. <https://doi.org/10.30863/aqym.v6i1.5210>.

¹¹ Mohamad Iwan Fitriani dan Nur Mahmudah, "Internalisasi "Satlogi Santri" Dalam Membentuk Akhlak Santri-Mahasiswa Di Universitas Kh. Abdul Chalim Pacet, Mojokerto," *Jurnal Al-Wasilah* 1, no. 1 (2025): 28-39. <https://doi.org/10.71094/jwasilah.vi1.42>.

¹² Dodi Ahmad Haerudin, "RELIGIOUS EDUCATION IN FORMING STUDENTS' CHARACTER," *EDUKASI ISLAMI: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM* 14, no. 1 (2025): 149-160. <https://doi.org/10.30868/ei.v14i01.8132>.

Artinya: "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." (HR. Ahmad).

Contoh: Program KKN mahasiswa PTKIN untuk pemberdayaan masyarakat desa.

e) Keilmuan

Menekankan pada pengembangan potensi intelektual dan keterampilan, dengan pemahaman bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu anugerah yang harus digunakan untuk kebaikan.¹³ Dengan kata lain ilmu agama dan umum dapat diintegrasikan. Hal ini relevan dengan QS. Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَسَّخُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَخُوا يَسْخُحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan".

Contoh kebijakan dengan nilai dasar ini adalah Kurikulum integratif di UIN yang menggabungkan kajian tafsir dengan ilmu sosial modern.

Dengan demikian, nilai-nilai dasar dalam kebijakan pendidikan Islam menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga menekankan dimensi spiritual, moral, kemanusiaan, dan sosial demi terwujudnya generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Prinsip Kebijakan Pendidikan Islam

Perumusan kebijakan publik merupakan elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia memberikan pedoman nilai dan prinsip dalam membentuk kebijakan yang berkeadaban. Adapun prinsip yang dimaksud dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam diantaranya sebagai berikut:

a) Keadilan

Prinsip keadilan ditemukan sebagai pusat dalam semua proses perumusan kebijakan Islam, memastikan bahwa hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan, diperhatikan secara adil tanpa diskriminasi. Keadilan dalam hal ini berupa pemerataan dalam pendidikan. Sejalan dengan QS. An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia

¹³ Hoirun Nisa, "Nilai-Nilai Ilahiyat Dalam Pendidikan Sebagai Syarat Pembentukan Kepribadian Muslim," *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2016):13-26. <https://doi.org/10.35897/ps.v4i1.47>.

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".

Implementasi dari prinsip ini dapat berupa pembangunan madrasah negeri di daerah terpencil agar tidak ada kesenjangan pendidikan, sehingga masyarakat dari daerah terpencil juga bisa merasakan pendidikan yang sama. Prinsip keadilan dalam pendidikan Islam juga ditegaskan oleh Anggi dalam penelitiannya bahwa kebijakan pendidikan harus menjamin distribusi kesempatan belajar secara merata.¹⁴

b) Maslahat

Maslahat berfungsi sebagai prinsip tujuan akhir kebijakan, menuntut bahwa setiap kebijakan harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat secara luas dan mengurangi kemungkinan kemudharatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pilihan kebijakan yang memenuhi prinsip maslahat sejalan dengan maqashid syariah yang mengutamakan kesejahteraan umat. Maqashid Syariah yang dimaksud adalah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan cara memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa (nyawa), akal, keturunan, dan harta.¹⁵ Sejalan dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yakni:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya (merugikan diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan orang lain" (HR. Ibnu Majah).

Program literasi digital untuk santri di pesantren merupakan wujud penerapan prinsip maslahat dalam pendidikan Islam. Melalui program ini, santri dibekali keterampilan menggunakan teknologi secara bijak dan produktif sehingga tidak tertinggal di era society 5.0. Literasi digital tidak hanya mengajarkan aspek teknis, tetapi juga kemampuan kritis dalam memilah informasi, menjaga etika bermedia, serta memanfaatkannya untuk dakwah, riset, dan wirausaha. Dengan demikian, maslahat tercapai karena santri memperoleh manfaat besar berupa peningkatan daya saing dan perluasan ruang dakwah, sekaligus terhindar dari dampak negatif seperti buta digital atau penyalahgunaan teknologi.

c) Akuntabilitas

Akuntabilitas menjadi prinsip penting yang mengatur bagaimana para pemimpin dan pembuat kebijakan harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka di hadapan publik dan Allah SWT. Keterbukaan serta mekanisme pengawasan menjadi perangkat utama yang memfasilitasi akuntabilitas.¹⁶ Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁴ Anggi Rizkina Sari Siregar, dkk, "Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera," *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2024): 37–47. <https://doi.org/10.61132/jpaes.vii4.697>.

¹⁵ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA," *Cross-border* 4, No. 2 (2021): 201–216.

¹⁶ Dedeng Yusuf Maolani, "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 1–7. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.137>.

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

Sistem akreditasi sekolah/madrasah oleh BAN-S/M mencerminkan prinsip akuntabilitas karena menilai mutu lembaga secara objektif dan transparan. Melalui akreditasi, sekolah/madrasah dapat mempertanggungjawabkan kualitas kurikulum, tenaga pendidik, dan manajemen kepada masyarakat serta pemerintah, sehingga mutu pendidikan Islam tetap terjaga dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

d) Amanah

Prinsip amanah mengedepankan nilai kejujuran, integritas, dan kesetiaan dalam menjalankan tugas sebagai penjaga kepercayaan umat dan titipan dari Allah. Amanah mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan.¹⁷ Sejalan dengan QS. An-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi:

لَنْ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya,.....”.

Pengelolaan dana BOS madrasah secara transparan merupakan wujud penerapan prinsip amanah dalam kebijakan pendidikan Islam. Dana yang diberikan pemerintah dikelola sesuai aturan dan kebutuhan prioritas, dilaporkan secara terbuka, serta diawasi bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan demikian, madrasah dapat menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa dana benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Etika dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan Islam

Etika dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam menjadi landasan penting agar setiap kebijakan yang lahir tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan tanggung jawab. Pendidikan dalam perspektif Islam menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial, sehingga proses penyusunan kebijakan harus memperhatikan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan.¹⁸ Dengan berpegang pada etika, kebijakan pendidikan Islam dapat mengarahkan lembaga pendidikan untuk menjalankan fungsinya secara benar, menjawab tantangan zaman, sekaligus tetap sejalan dengan tujuan utama pendidikan Islam, yakni membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.¹⁹

¹⁷ Riski Amalia M., dkk, “Integrasi Konsep Amanah dalam Shariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 1 (2024): 140-148. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>.

¹⁸ Dwi Puji Amalia dan Ahmad Manshur, “Islamic Education Management in the Perspective of the Quran and Hadith,” *Firdaus Journal* 4, no. 1 (2024): 1-6. <https://doi.org/10.37134/firdaus.vol4.1.1.2024>

¹⁹ Anggi Rizkina Sari Siregar, dkk, “Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera,” *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2024): 37-47. <https://doi.org/10.61132/jpaes.vii4.697>

Etika kebijakan dalam Islam mengintegrasikan nilai niat ikhlas, kejujuran, dan transparansi pada semua tahapan kebijakan. Niat yang benar akan mencegah penyimpangan nilai selama proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Melepaskan etika kebijakan dari nilai Islam berpotensi menimbulkan kebijakan yang represif, korup, dan tidak berkeadilan. Oleh karena itu, edukasi dan pembelajaran nilai-nilai etika Islam menjadi sangat vital bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bermartabat.²⁰ Etika yang dimaksud dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam diantaranya sebagai berikut:

a) Etika Tauhid

Etika tauhid menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh diletakkan semata pada tujuan sekuler atau material, akan tetapi kebijakan harus menjadikan pembinaan akhlak dan pembentukan keimanan sebagai tujuan pokok sekaligus tujuan instrumental. Contoh dari etika ini adalah pendidikan yang menyejahterakan sosial dan spiritual, bukan hanya mengejar output ekonomi. Dalam praktik kebijakan, penolakan terhadap program yang hanya mengukur keberhasilan lewat indikator ekonomi semata dapat diwujudkan lewat kurikulum yang mengintegrasikan pembinaan karakter dan nilai ketauhidan bersama kompetensi vokasional.²¹

b) Etika Keadilan Sosial

Etika keadilan sosial mengarahkan pembuat kebijakan untuk memprioritaskan kelompok rentan seperti yatim, dhuafa, penyandang disabilitas, sehingga akses dan kesempatan pendidikan menjadi nyata bagi mereka. Misalnya program pendidikan gratis di madrasah bagi yatim dan dhuafa atau kuota beasiswa khusus. Literatur tentang etika Islam menegaskan bahwa 'adl (keadilan) merupakan pilar yang mengikat tujuan sosial dan distribusi kesejahteraan, sehingga kebijakan pendidikan yang adil wajib memperhitungkan redistribusi kesempatan.²²

c) Kejujuran

Kejujuran pada level kebijakan berarti transparansi proses dan hasil serta penolakan praktik manipulatif seperti suap, manipulasi data, dan nepotisme. Contoh konkret: transparansi penuh dalam penerimaan siswa baru, mulai dari pengumuman kuota, mekanisme seleksi, dan audit publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik suap dan menjaga legitimasi lembaga. Kajian etika Islam, termasuk pada ranah manajemen dan praktik bisnis/organisasi, menempatkan kejujuran sebagai syarat utama legitimasi institusional dan pencegah korupsi.²³

d) Tanggung Jawab (Amanah)

Etika amanah mendorong perumusan kebijakan yang mempertimbangkan dampak lintas generasi dan keberlanjutan, bukan solusi jangka pendek. Contohnya,

²⁰ Fatin Hamamah, "Islamic Education and the Principles of Social Justice: Implications for Government Responsibilities in Providing Compensation and Restitution," *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 7, no 1 (2023): 216-225. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.396>.

²¹ Hairus Saleh, "Landasan Filosofis Pendidikan Islam (Peran Tauhid dalam Konsep Pendidikan Islam Ismail Raji al-Faruqi)," *FAKTA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, No. 1 (2023): 29-42. <http://ejournal.idia.ac.id/index.php/fakta>.

²² Molina Ibrahim, dkk, "Addressing contemporary ethical and moral issues through islamic education," *Journal on Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 36-51. <https://doi.org/10.35335/kbbzar83>

²³ Ibid.

investasi terencana pada pengembangan madrasah digital berbasis pedagogi dan infrastruktur agar lulusan siap menghadapi tantangan zaman berupa literasi dan etika digital, sekaligus mempertahankan identitas keagamaan. Literatur manajemen pendidikan Islam menekankan amanah dan akuntabilitas sebagai prinsip untuk perencanaan kebijakan yang berkelanjutan.²⁴

KESIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam harus berakar pada asas dan nilai dasar ajaran Islam agar tidak terjebak pada kepentingan pragmatis semata. Asas tauhid, keadilan, kebebasan, persamaan, dan musyawarah menjadi pilar utama yang memastikan arah pendidikan tetap sesuai dengan visi ilahiah. Nilai dasar seperti ilahiah, insaniyah, akhlak, sosial, dan keilmuan membentuk fondasi yang menyeimbangkan aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Prinsip keadilan, maslahat, akuntabilitas, dan amanah menjadi panduan implementasi yang menjamin pemerataan, kebermanfaatan, transparansi, serta integritas dalam setiap kebijakan. Sementara itu, etika tauhid, keadilan sosial, kejujuran, dan tanggung jawab memberikan arah moral yang mencegah lahirnya kebijakan yang koruptif dan diskriminatif. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam yang berbasis asas, nilai dasar, prinsip, dan etika Islam tidak hanya menjawab kebutuhan zaman, tetapi juga memastikan tercapainya tujuan utama pendidikan Islam yaitu lahirnya generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Sholehah, Rif'atus dkk. "Peran Strategi Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik Yang Religius, Toleran, Dan Berakhlak Mulia Di Era Globalisasi," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 8 (2025).
- Syafira, Ade Chia dkk. "Dasar dan Asas Pendidikan dalam Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022).
- Azzahra, Radita dkk. "Analisis Dasar-Dasar Pendidikan Islam Berdasarkan Perspektif Filosofis, Akademis, Sosiologi, Politik, Dan Ekonomi," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2024).
- Atina, dkk. "NILAI-NILAI AKSIOLOGIS DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM," *Pendas: Jurnal ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 2 (2025).
- Sirait, Nurhalimatus dan Suriana. "Macam-Macam Asas Pendidikan Islam," *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* 5, no. 1 (2024).
- Saleh, Hairus. "Landasan Filosofis Pendidikan Islam (Peran Tauhid dalam Konsep Pendidikan Islam Ismail Raji al-Faruqi)," *FAKTA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, No. 1 (2023).

²⁴ Amelia Nur Rochim dan M Imamul Muttaqien, "Keadilan, Amanah, dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam dalam Manajemen Pendidikan Modern," *Jurnal Visi Manajemen* 11, No. 1 (2025): 1-12. <https://doi.org/10.56910/jvm.v11i2.513>

- Saing, Siti Aminah Saing dkk. "Eksplorasi Peran Keadilan Sosial dan Budaya Dalam Menciptakan Lingkungan Pendidikan Yang Inklusif," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 2, no. 3 (2023).
- Usri. "Pendidikan Islam dan Demokrasi," *AL-Mutsala: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, no. 2 (2019).
- Najiburrahman, dkk. "Implementation of the Tahfidz Quran Program in Developing Islamic Character," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 4 (2022).
- Sarima, Andi. "PENDIDIKAN INKLUSI (ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS) PERSPEKTIF ILMU PENDIDIKAN ISLAM," *Jurnal Al-Qayyimah* 6, no. 1 (2023).
- Fitriani, Mohamad Iwan & Nur Mahmudah. "Internalisasi "Satlogi Santri" Dalam Membentuk Akhlak Santri-Mahasiswa Di Universitas Kh. Abdul Chalim Pacet, Mojokerto," *Jurnal Al-Wasilah* 1, no. 1 (2025).
- Haerudin, Dodi Ahmad Haerudin. "RELIGIOUS EDUCATION IN FORMING STUDENTS' CHARACTER," *EDUKASI ISLAMI: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM* 14, no. 1 (2025).
- Nisa, Hoirun. "Nilai-Nilai Ilahiyat Dalam Pendidikan Sebagai Syarat Pembentukan Kepribadian Muslim," *Jurnal Pusaka: Media Kajian dan Pemikiran Islam* 4, no. 1 (2016).
- Siregar, Anggi Rizkina Sari dkk. "Landasan Teologi Ekonomi Islam: Peran Tauhid dan Keadilan dalam Mewujudkan Ekonomi yang Adil dan Sejahtera," *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah* 1, no. 4 (2024).
- Paryadi. "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA," *Cross-border* 4, No. 2 (2021).
- Maolani, Dedeng Yusuf. "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023).
- M, Riski Amalia dkk. "Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 1 (2024).
- Amalia, Dwi Puji & Ahmad Manshur. "Islamic Education Management in the Perspective of the Quran and Hadith," *Firdaus Journal* 4, no. 1 (2024).
- Hamamah, Fatin. "Islamic Education and the Principles of Social Justice: Implications for Government Responsibilities in Providing Compensation and Restitution," *Al-Hayat: Journal of Islamic Education* 7, no 1 (2023).
- Ibrahim, Molina dkk. "Addressing contemporary ethical and moral issues through islamic education," *Journal on Islamic Studies* 1, no. 1 (2024).
- Rochim, Amelia Nur & M. Imamul Muttaqien. "Keadilan, Amanah, dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam dalam Manajemen Pendidikan Modern," *Jurnal Visi Manajemen* 11, No. 1 (2025).